RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PACE

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pace kabupaten Nganjuk sampai triwulan II tahun berkenan, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 47

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2 Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 47
3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 54

BAB V PENUTUP 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

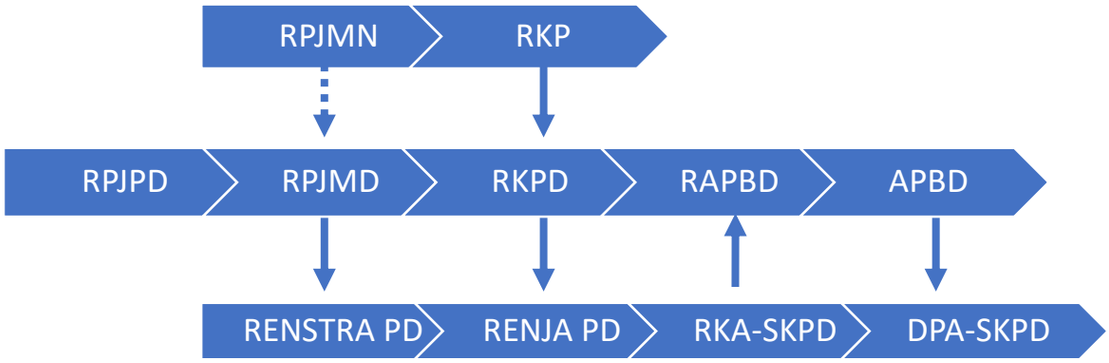
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Pace sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Pace melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pace Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pace tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pace dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pace s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**				**KECAMATAN PACE**		**15,709,349,865**	**5,597,405,128**	**2,864,776,108**	**2,328,879,099**	**81.29%**	**3,056,920,850**	**11,067,404,837**	**70%**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**	**14,516,838,764**	**5,113,252,380**	**2,689,043,208**	**2,203,983,899**	**81.96%**	**2,823,041,550**	**10,293,594,739**	**71%**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**	**8,044,600**	**2,280,000**	**2,178,600**	**837,100**	**38.42%**	**366,000**	**5,518,350**	**69%**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,044,600	2,280,000	2,178,600	837,100	38.42%	366,000	5,518,350	69%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**13,098,072,505**	**4,436,598,069**	**2,448,955,258**	**2,044,904,479**	**83.50%**	**2,545,825,350**	**9,209,966,208**	**70%**

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13,083,540,755	4,433,864,069	2,445,933,458	2,044,104,979	83.57%	2,542,815,400	9,200,247,058	70%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,799,150	1,842,000	1,999,900	621,500	31.08%	2,299,250	6,298,450	72%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,732,600	892,000	1,021,900	178,000	17.42%	710,700	3,420,700	60%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**64,649,350**	**8,750,000**	**15,079,350**	**1,750,000**	**11.61%**	**16,920,000**	**28,422,250**	**44%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41,636,250	6,050,000	10,916,250	0	0.00%	15,120,000	16,966,250	41%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23,013,100	2,700,000	4,163,100	1,750,000	42.04%	1,800,000	11,456,000	50%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**	**377,574,250**	**130,856,770**	**81,015,950**	**48,971,050**	**60.45%**	**35,756,300**	**241,931,270**	**64%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,642,500	16,477,600	1,823,100	1,646,700	90.32%	3,819,400	23,043,700	157%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	103,134,300	31,435,520	45,533,050	36,641,850	80.47%	11,951,250	97,586,320	95%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,855,000	5,161,800	2,310,000	2,245,500	97.08%	1,545,000	11,718,300	74%

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14,655,000	5,815,000	3,000,000	2,940,000	98.00%	3,000,000	11,755,000	80%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70,622,800	39,729,850	9,106,800	0	00.00%	5,036,000	49,489,300	70%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,540,050	31,637,000	18,643,000	5,550,000	29.50%	10,005,050	47,192,050	32%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,124,600	600,000	600,000	0	0.00%	399,600	1,199,600	12%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**	**256,758,909**	**262,417,026**	**4,155,050**	**0**	**0.00%**	**62,271,100**	**290,683,526**	**113%**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75,059,450	52,275,000	3,624,750	0	0.00%	15,259,700	73,041,500	97%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181,699,459	210,142,026	530,300	0	0.00%	47,011,400	217,642,026	120%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**	**197,450,000**	**44,278,752**	**47,100,000**	**34,184,841**	**72.58%**	**47,100,000**	**122,263,593**	**62%**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,850,000	12,750,000	1,500,000	1,000,000	66.67%	1,500,000	15,250,000	51%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	167,600,000	31,528,752	45,600,000	33,184,841	72.77%	45,600,000	107,013,593	64%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**	**514,289,150**	**228,071,763**	**90,559,000**	**73,336,429**	**80.98%**	**114,802,800**	**394,809,542**	**77%**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	179,082,100	57,768,713	33,409,000	25,026,429	74.91%	43,522,900	119,918,742	67%

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9,510,000	3,959,800	1,200,000	0	0.00%	600,000	4,409,800	46%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38,900,000	23,285,000	7,950,000	5,710,000	71.82%	1,950,000	37,545,000	97%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	218,932,050	143,058,250	42,600,000	42,600,000	100.00%	51,265,700	231,221,850	106%
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67,865,000		5,400,000	0	0.00%	17,464,200	1,714,150	3%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**466,953,501**	**489,201,949**	**82,681,050**	**16,861,250**	**20.39%**	**73,926,600**	**584,737,199**	**125%**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**218,151,600**	**118,673,048**	**61,590,900**	**4,504,250**	**7.31%**	**54,562,500**	**182,847,298**	**84%**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	218,151,600	118,673,048	61,590,900	4,504,250	7.31%	54,562,500	182,847,298	84%
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**21,348,650**	**21,348,650**	**8,206,150**	**375,000**	**4.35%**	**1,187,500**	**28,245,650**	**132%**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21,348,650	21,348,650	8,206,150	375,000	4.35%	1,187,500	28,245,650	132%

7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**227,453,251**	**349,180,251**	**12,884,000**	**12,000,000**	**93.14%**	**18,176,600**	**373,662,251**	**164%**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	227,453,251	349,180,251	12,884,000	12,000,000	93.14%	18,176,600	373,662,251	164%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	**236,662,650**	**66,030,000**	**22,290,100**	**90,471,450**	**405.88%**	**54,174,200**	**178,312,950**	**75%**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**236,662,650**	**66,030,000**	**22,290,100**	**90,471,450**	**405.88%**	**54,174,200**	**178,312,950**	**75%**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	129,555,450	49,928,250	14,307,800	7,362,750	51.46%	19,843,700	71,406,200	55%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	107,107,200	16,101,750	7,982,300	83,108,700	1041.16%	34,330,500	106,906,750	100%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**219,278,950**	**65,019,300**	**24,935,050**	**900,000**	**3.61%**	**59,743,900**	**88,152,700**	**40%**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**	**219,278,950**	**65,019,300**	**24,935,050**	**900,000**	**3.61%**	**59,743,900**	**88,152,700**	**40%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	219,278,950	65,019,300	24,935,050	900,000	3.61%	59,743,900	88,152,700	40%

						Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**104,608,450**	**51,245,000**	**20,304,850**	**2,100,000**	**10.34%**	**12,359,000**	**71,072,300**	**68%**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**104,608,450**	**51,245,000**	**20,304,850**	**2,100,000**	**10.34%**	**12,359,000**	**71,072,300**	**68%**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	104,608,450	51,245,000	20,304,850	2,100,000	10.34%	12,359,000	71,072,300	68%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**165,007,550**	**30,841,800**	**25,521,850**	**14,562,500**	**57.06%**	**33,675,600**	**69,720,250**	**42%**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**165,007,550**	**30,841,800**	**25,521,850**	**14,562,500**	**57.06%**	**33,675,600**	**69,720,250**	**42%**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	125,046,500	26,229,200	22,768,700	14,562,500	63.69%	28,203,700	60,996,000	49%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	39,961,050	4,612,600	2,753,150	0	0.00%	5,471,900	8,724,250	22%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pace dan pencapaian Renstra Kecamatan Pace s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pace, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	125%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Realisasi capaian program dan kegiatan melebihi target yang ditentukan	minimnya risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan tercapainya target kinerja
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja masih dalam proses penyerapan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja masih dalam proses penyerapan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Pace Tahun 2022 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pace berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pace.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjukyang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Tugas pokok Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu: Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan dan Tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Kecamatan, Camat bertugas:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok masing-masing Pejabat Struktural di Kecamatan Pace Adalah sebagai berikut:

1) CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umumpemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai fungsi:

a) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b) Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i) Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SubbagianKeuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4) SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

5) SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pengkoordinasian / pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f) Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2) Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4) Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
5) Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	1500	1550	1600	1650	1700	1485	1491	1500	1521	99,00%	96,19%	93,75%	92,18%
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk	3975	3975	4100	4200	4300	3726	3910	4065	4180	93,74%	98,36%	99,15%	99,52%
8.	Meningkatnya sarana/prasarana layak fungsi	137	185	257	261	265	137	185	257	261	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76	76	76	76	76	76	76	76	76	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Jumlah UMKM Terbina	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
12	Tersusunya Hasil Musrenbang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya Data Koperasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
15	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Kualitas Keagamaan (Majelis Ta'lim, MUI, dll)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
17	Laporan dan Evaluasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Linmas Aktif	76	76	76	76	76	76	76	76	76	100%	100%	100%	100%

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3) Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Pace memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 (dua) serta sasaran strategis daerah yaitu meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

9) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
   a) pendidikan;
   b) kesehatan;
   c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
   f) sosial.
10) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) ditetapkan sebagai SPM.
11) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada nomor (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
   a) bersifat mutlak; dan
   b) mudah distandarkan,

   yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15) Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation*)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

a) Kecamatan Pace jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Pace.

b) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

c) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Pace harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

d) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

e) TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (Good Governance)

f) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.

g) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah.

h) Income perkapita masyarakat masih rendah.

i) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

j) Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan

kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pace.

2) Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pace dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahansebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b) Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pace untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c) Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pace dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

d) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pace;

e) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

f) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dalam mengenalkan potensi Kecamatan Pace;

g) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h) Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Pace. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;
i) Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pace. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pace telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Pace, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–

sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR).

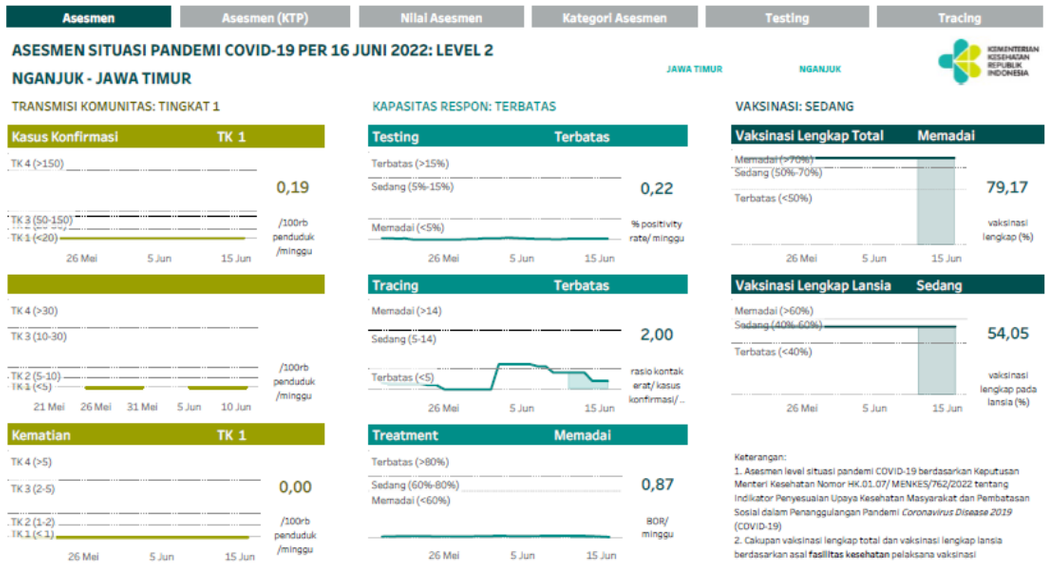
c) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

2.3.6. Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa

identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				**3,056,920,850**	**KECAMATAN**				**3,093,494,784**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**		**2,796,920,850**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**		**2,788,459,934**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**		**2,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**		**2,035,050**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,035,050	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**2,548,815,400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**		**2,580,236,900**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang disusun tepat waktu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	2,542,815,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	2,542,815,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,131,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	34,290,400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**13,600,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**6,855,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Kab. Nganjuk,	Jumlah Paket Pakaian Dinas	3 Paket	10,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab. Nganjuk,	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Dokumen	3,255,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Atribut Kelengkapannya	Pace, Semua Kelurahan	beserta Atribut Kelengkapan			Beserta Atribut Kelengkapannya	Pace, Semua Kelurahan	beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	3,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	3,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**		**53,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**		**62,084,650**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,170,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32,877,650	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	353,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	3,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan	Semua Kelurahan	Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan	Semua Kelurahan	Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	8,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	11,762,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	15,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9,449,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	471,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**		**18,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**		**12,633,334**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	3,500,000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4,500,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8,133,334	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**		**41,500,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**		**43,500,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**		**119,505,450**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**		**81,115,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	44,105,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39,273,400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	2,400,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	9,077,600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,672,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Uni	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	13,092,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**85,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**128,356,200**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan**		**55,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**		**108,062,500**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Tingkat Kecamatan		**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**Tingkat Kecamatan**		**Tingkat Kecamatan**			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	55,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	108,062,500	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**5,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**2,888,000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2,888,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		**25,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		**17,405,700**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	17,405,700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**		**65,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**		**73,448,700**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**		**65,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**		**73,448,700**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan 6 Lembaga	40,730,300	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	3 Dokumen	40,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	3 Laporan	32,718,400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		di Wilayah Kerja Kecamatan			Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**60,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**52,133,350**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**		**60,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**		**52,133,350**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	60,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	52,133,350	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**		**14,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**		**9,488,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**14,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		**9,488,000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76 Orang	14,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76 Orang	9,488,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**36,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**41,608,600**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**		**36,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**		**41,608,600**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Desa					**Pemerintahan Desa**					
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	30,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Laporan	34,220,600	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	6,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Laporan	7,388,000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola pemerintahan Kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan , Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pace

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	IKM (Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat)	82
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85 100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan TataKelola Pemerintahan yang baik	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

1) PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

a) Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik
c) Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
d) Program Koordinasi ketentraman & ketertiban umum
e) Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
f) Program Pembinaan & pengawasan Pemerintahan desa

2) KEGIATAN

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
   - Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD
   - Penyediaan gaji & tunjangan ASN
   - Koordinasi & penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Koordinasi & penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Bahan logistic kantor
   - Penyediaan barang cetakan & penggandaan 2021
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi skpd
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan & mesin lainya
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya

b) Program Penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan public
- Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertical terkait
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana & prasarana pelayanan umum
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

d) Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2) Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6) Peningkatan ketahanan bencana; dan
7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;

2) Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10) Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12) Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14) Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2 Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

3.3.3 Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi

di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1) Penanganan kesehatan;
2) Penanganan dampak ekonom; dan
3) Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Pace sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pace dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Kecamatan Pace dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	3.093.494.784

Tabel 4.2
Sasaran Pace

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)	
				Program	Pagu Indikatif
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,788,459,934
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	1) Nilai Sakip Kecamatan 2) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128,356,200
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73,448,700
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBA	52,133,350

				N UMUM	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,488,000
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41,608,600

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Pace sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pace dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Pace dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Kecamatan Pace yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Seluruh unit kerja pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pace Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b) melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pace, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pace; dan

c) menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Pace dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,093,494,784**					**3,270,900,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,788,459,934**					**2,946,900,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,035,050**					**2,000,000**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan, Keuangan dan kinerja tepat waktu	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	6 Laporan	100 Persen	2,035,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,580,236,900**					**2,639,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	3 Dokumen	2,542,815,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	2,600,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	3 Dokumen	3,131,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	4,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	3 Dokumen	34,290,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,855,000**					**25,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	2 Dokumen	3,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	10,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	2 Dokumen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**62,084,650**					**53,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Paket	7 Dokumen	4,170,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	5,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	3 Paket	7 Dokumen	32,877,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	2 Paket	7 Dokumen	353,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	5,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	7 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	3,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	3 Laporan	7 Dokumen	11,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	8,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	2 Laporan	7 Dokumen	9,449,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	15,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	1 Dokumen	7 Dokumen	471,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,633,334**					**66,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	3 Unit	5 Unit	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	2 Unit	5 Unit	8,133,334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	16,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,500,000**					**41,500,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kehadiran ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	1,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tingkat kehadiran ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	40,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81,115,000**					**120,400,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	82 Skor	39 Unit	100 Persen	39,273,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	45,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	38 Unit	100 Persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	2,400,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	52 Unit	100 Persen	9,077,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	3,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	2 Unit	100 Persen	15,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	50,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	6 Unit	100 Persen	13,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**128,356,200**					**141,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**108,062,500**					**111,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah DOkumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	108,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	111,000,000
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**2,888,000**					**5,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	5,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**17,405,700**					**25,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan	1 Laporan	17,405,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**73,448,700**					**76,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**73,448,700**					**76,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pra Musrenbangcam Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan 6 Lembaga	5 Dokumen	40,730,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa	92 Persen	42,000,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Laporan Kegiatan BUMDesa Jumlah Laporan Kegiatan Gerakan PKK Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	5 Dokumen	32,718,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa	92 Persen	34,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**52,133,350**					**54,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**52,133,350**					**54,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Forpincam Jumlah Laporan Kegiatan HUT KAB, NGANJUK Jumlah Laporan Kegiatan PHBN	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	3 Laporan	52,133,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92 Persen	54,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**9,488,000**					**10,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**9,488,000**					**10,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tingkat efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	76 Orang	1 Laporan	9,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	92 Persen	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**41,608,600**					**43,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**41,608,600**					**43,000,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Desa Jumlah Laporan Keuangan Desa Jumlah Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	5 Dokumen	34,220,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92 Persen	35,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Laporan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Laporan 1 Laporan	5 Dokumen	7,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92 Persen	8,000,000
												TOTAL	**3,093,494,784**					**3,270,900,000**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pace kabupaten Nganjuk sampai triwulan II tahun berkenan, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 47

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2 Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 47
3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 54

BAB V PENUTUP 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

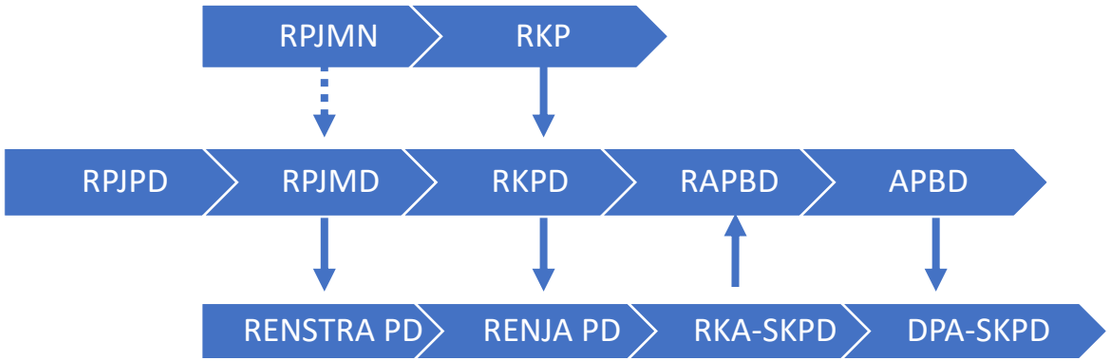
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Pace sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Pace melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pace Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pace tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pace dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pace s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**				**KECAMATAN PACE**		**15,709,349,865**	**5,597,405,128**	**2,864,776,108**	**2,328,879,099**	**81.29%**	**3,056,920,850**	**11,067,404,837**	**70%**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**	**14,516,838,764**	**5,113,252,380**	**2,689,043,208**	**2,203,983,899**	**81.96%**	**2,823,041,550**	**10,293,594,739**	**71%**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**	**8,044,600**	**2,280,000**	**2,178,600**	**837,100**	**38.42%**	**366,000**	**5,518,350**	**69%**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,044,600	2,280,000	2,178,600	837,100	38.42%	366,000	5,518,350	69%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**13,098,072,505**	**4,436,598,069**	**2,448,955,258**	**2,044,904,479**	**83.50%**	**2,545,825,350**	**9,209,966,208**	**70%**

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13,083,540,755	4,433,864,069	2,445,933,458	2,044,104,979	83.57%	2,542,815,400	9,200,247,058	70%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,799,150	1,842,000	1,999,900	621,500	31.08%	2,299,250	6,298,450	72%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,732,600	892,000	1,021,900	178,000	17.42%	710,700	3,420,700	60%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**64,649,350**	**8,750,000**	**15,079,350**	**1,750,000**	**11.61%**	**16,920,000**	**28,422,250**	**44%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41,636,250	6,050,000	10,916,250	0	0.00%	15,120,000	16,966,250	41%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23,013,100	2,700,000	4,163,100	1,750,000	42.04%	1,800,000	11,456,000	50%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**	**377,574,250**	**130,856,770**	**81,015,950**	**48,971,050**	**60.45%**	**35,756,300**	**241,931,270**	**64%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,642,500	16,477,600	1,823,100	1,646,700	90.32%	3,819,400	23,043,700	157%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	103,134,300	31,435,520	45,533,050	36,641,850	80.47%	11,951,250	97,586,320	95%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,855,000	5,161,800	2,310,000	2,245,500	97.08%	1,545,000	11,718,300	74%

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14,655,000	5,815,000	3,000,000	2,940,000	98.00%	3,000,000	11,755,000	80%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70,622,800	39,729,850	9,106,800	0	00.00%	5,036,000	49,489,300	70%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,540,050	31,637,000	18,643,000	5,550,000	29.50%	10,005,050	47,192,050	32%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,124,600	600,000	600,000	0	0.00%	399,600	1,199,600	12%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**	**256,758,909**	**262,417,026**	**4,155,050**	**0**	**0.00%**	**62,271,100**	**290,683,526**	**113%**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75,059,450	52,275,000	3,624,750	0	0.00%	15,259,700	73,041,500	97%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181,699,459	210,142,026	530,300	0	0.00%	47,011,400	217,642,026	120%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**	**197,450,000**	**44,278,752**	**47,100,000**	**34,184,841**	**72.58%**	**47,100,000**	**122,263,593**	**62%**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,850,000	12,750,000	1,500,000	1,000,000	66.67%	1,500,000	15,250,000	51%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	167,600,000	31,528,752	45,600,000	33,184,841	72.77%	45,600,000	107,013,593	64%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**	**514,289,150**	**228,071,763**	**90,559,000**	**73,336,429**	**80.98%**	**114,802,800**	**394,809,542**	**77%**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	179,082,100	57,768,713	33,409,000	25,026,429	74.91%	43,522,900	119,918,742	67%

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9,510,000	3,959,800	1,200,000	0	0.00%	600,000	4,409,800	46%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38,900,000	23,285,000	7,950,000	5,710,000	71.82%	1,950,000	37,545,000	97%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	218,932,050	143,058,250	42,600,000	42,600,000	100.00%	51,265,700	231,221,850	106%
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67,865,000		5,400,000	0	0.00%	17,464,200	1,714,150	3%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**466,953,501**	**489,201,949**	**82,681,050**	**16,861,250**	**20.39%**	**73,926,600**	**584,737,199**	**125%**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**218,151,600**	**118,673,048**	**61,590,900**	**4,504,250**	**7.31%**	**54,562,500**	**182,847,298**	**84%**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	218,151,600	118,673,048	61,590,900	4,504,250	7.31%	54,562,500	182,847,298	84%
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**21,348,650**	**21,348,650**	**8,206,150**	**375,000**	**4.35%**	**1,187,500**	**28,245,650**	**132%**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21,348,650	21,348,650	8,206,150	375,000	4.35%	1,187,500	28,245,650	132%

7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**227,453,251**	**349,180,251**	**12,884,000**	**12,000,000**	**93.14%**	**18,176,600**	**373,662,251**	**164%**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	227,453,251	349,180,251	12,884,000	12,000,000	93.14%	18,176,600	373,662,251	164%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	**236,662,650**	**66,030,000**	**22,290,100**	**90,471,450**	**405.88%**	**54,174,200**	**178,312,950**	**75%**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**236,662,650**	**66,030,000**	**22,290,100**	**90,471,450**	**405.88%**	**54,174,200**	**178,312,950**	**75%**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	129,555,450	49,928,250	14,307,800	7,362,750	51.46%	19,843,700	71,406,200	55%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	107,107,200	16,101,750	7,982,300	83,108,700	1041.16%	34,330,500	106,906,750	100%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**219,278,950**	**65,019,300**	**24,935,050**	**900,000**	**3.61%**	**59,743,900**	**88,152,700**	**40%**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**	**219,278,950**	**65,019,300**	**24,935,050**	**900,000**	**3.61%**	**59,743,900**	**88,152,700**	**40%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	219,278,950	65,019,300	24,935,050	900,000	3.61%	59,743,900	88,152,700	40%

						Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**104,608,450**	**51,245,000**	**20,304,850**	**2,100,000**	**10.34%**	**12,359,000**	**71,072,300**	**68%**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**104,608,450**	**51,245,000**	**20,304,850**	**2,100,000**	**10.34%**	**12,359,000**	**71,072,300**	**68%**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	104,608,450	51,245,000	20,304,850	2,100,000	10.34%	12,359,000	71,072,300	68%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**165,007,550**	**30,841,800**	**25,521,850**	**14,562,500**	**57.06%**	**33,675,600**	**69,720,250**	**42%**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**165,007,550**	**30,841,800**	**25,521,850**	**14,562,500**	**57.06%**	**33,675,600**	**69,720,250**	**42%**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	125,046,500	26,229,200	22,768,700	14,562,500	63.69%	28,203,700	60,996,000	49%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	39,961,050	4,612,600	2,753,150	0	0.00%	5,471,900	8,724,250	22%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pace dan pencapaian Renstra Kecamatan Pace s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pace, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	125%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Realisasi capaian program dan kegiatan melebihi target yang ditentukan	minimnya risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan tercapainya target kinerja
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja masih dalam proses penyerapan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja belum sepenuhnya diserap masih dalam proses realisasi	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Target kinerja masih dalam proses penyerapan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan realisasi target kinerja dengan tepat waktu

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Pace Tahun 2022 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pace berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pace.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjukyang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Tugas pokok Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu: Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan dan Tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Kecamatan, Camat bertugas:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok masing-masing Pejabat Struktural di Kecamatan Pace Adalah sebagai berikut:

1) CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umumpemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai fungsi:

a) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b) Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i) Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SubbagianKeuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4) SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

5) SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pengkoordinasian / pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f) Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2) Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4) Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
5) Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	1500	1550	1600	1650	1700	1485	1491	1500	1521	99,00%	96,19%	93,75%	92,18%
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk	3975	3975	4100	4200	4300	3726	3910	4065	4180	93,74%	98,36%	99,15%	99,52%
8.	Meningkatnya sarana/prasarana layak fungsi	137	185	257	261	265	137	185	257	261	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76	76	76	76	76	76	76	76	76	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Jumlah UMKM Terbina	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
12	Tersusunya Hasil Musrenbang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya Data Koperasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
15	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Kualitas Keagamaan (Majelis Ta'lim, MUI, dll)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
17	Laporan dan Evaluasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Linmas Aktif	76	76	76	76	76	76	76	76	76	100%	100%	100%	100%

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3) Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Pace memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 (dua) serta sasaran strategis daerah yaitu meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

9) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
   a) pendidikan;
   b) kesehatan;
   c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
   f) sosial.
10) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) ditetapkan sebagai SPM.
11) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada nomor (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
   a) bersifat mutlak; dan
   b) mudah distandarkan,

   yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15) Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation*)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

a) Kecamatan Pace jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Pace.

b) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

c) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Pace harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

d) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

e) TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (Good Governance)

f) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.

g) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah.

h) Income perkapita masyarakat masih rendah.

i) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

j) Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan

kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pace.

2) Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pace dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahansebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b) Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pace untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c) Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pace dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

d) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pace;

e) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

f) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dalam mengenalkan potensi Kecamatan Pace;

g) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h) Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Pace. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;
i) Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pace. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pace telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Pace, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–

sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR).

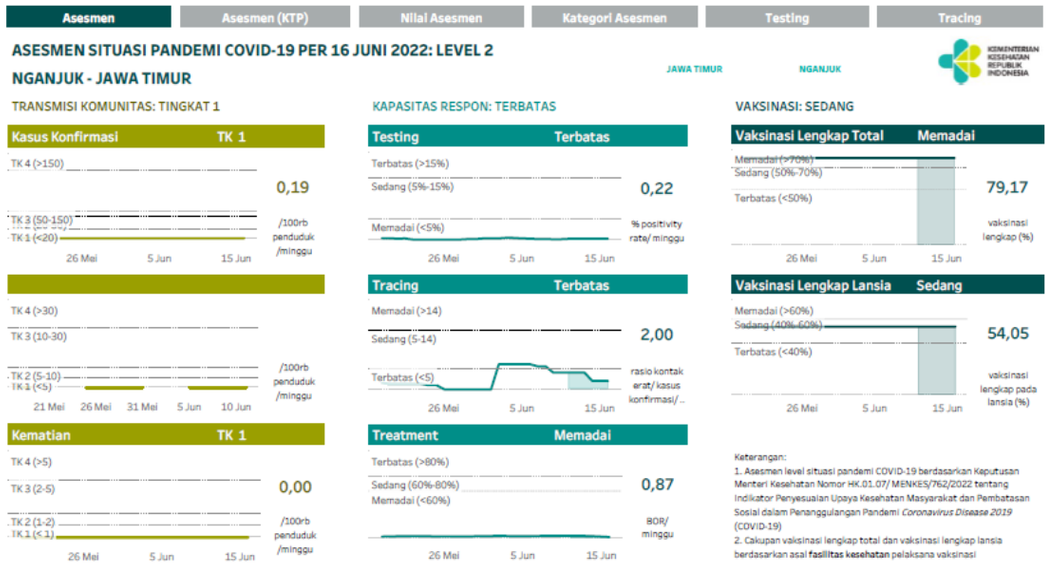
c) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

2.3.6. Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa

identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				**3,056,920,850**	**KECAMATAN**				**3,093,494,784**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**		**2,796,920,850**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM**		**2,788,459,934**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**		**2,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**		**2,035,050**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,035,050	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**2,548,815,400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**		**2,580,236,900**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang disusun tepat waktu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	2,542,815,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	2,542,815,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,131,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	34,290,400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**13,600,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**6,855,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Kab. Nganjuk,	Jumlah Paket Pakaian Dinas	3 Paket	10,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab. Nganjuk,	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Dokumen	3,255,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Atribut Kelengkapannya	Pace, Semua Kelurahan	beserta Atribut Kelengkapan			Beserta Atribut Kelengkapannya	Pace, Semua Kelurahan	beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	3,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	3,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**		**53,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun**		**62,084,650**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,170,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32,877,650	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	353,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	3,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan	Semua Kelurahan	Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan	Semua Kelurahan	Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	8,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	11,762,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	15,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9,449,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	471,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**		**18,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor**		**12,633,334**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	3,500,000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4,500,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8,133,334	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**		**41,500,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun**		**43,500,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**		**119,505,450**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun**		**81,115,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	44,105,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39,273,400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	2,400,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	9,077,600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,672,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Uni	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	13,092,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**85,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**128,356,200**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan**		**55,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**		**108,062,500**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Tingkat Kecamatan		**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**Tingkat Kecamatan**		**Tingkat Kecamatan**			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	55,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	108,062,500	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**5,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**2,888,000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2,888,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		**25,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		**17,405,700**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	17,405,700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**		**65,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat efektifitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**		**73,448,700**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**		**65,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**		**73,448,700**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan 6 Lembaga	40,730,300	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	3 Dokumen	40,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	3 Laporan	32,718,400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		di Wilayah Kerja Kecamatan			Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**60,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Tingkat efektifitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**52,133,350**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**		**60,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan**		**52,133,350**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	60,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	52,133,350	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**		**14,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Tingkat efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**		**9,488,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**14,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		**9,488,000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76 Orang	14,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76 Orang	9,488,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**36,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**41,608,600**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**		**36,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**		**41,608,600**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Desa					**Pemerintahan Desa**					
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	30,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Laporan	34,220,600	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	6,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Laporan	7,388,000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola pemerintahan Kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan , Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pace

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	IKM (Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat)	82
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85 100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan TataKelola Pemerintahan yang baik	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

1) PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

a) Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik
c) Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
d) Program Koordinasi ketentraman & ketertiban umum
e) Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
f) Program Pembinaan & pengawasan Pemerintahan desa

2) KEGIATAN

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
   - Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD
   - Penyediaan gaji & tunjangan ASN
   - Koordinasi & penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Koordinasi & penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Bahan logistic kantor
   - Penyediaan barang cetakan & penggandaan 2021
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi skpd
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan & mesin lainya
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya

b) Program Penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan public
- Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertical terkait
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana & prasarana pelayanan umum
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

d) Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2) Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6) Peningkatan ketahanan bencana; dan
7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;

2) Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10) Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12) Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14) Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2 Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

3.3.3 Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi

di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1) Penanganan kesehatan;
2) Penanganan dampak ekonom; dan
3) Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Pace sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pace dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Kecamatan Pace dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	3.093.494.784

Tabel 4.2
Sasaran Pace

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)	
				Program	Pagu Indikatif
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,788,459,934
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	1) Nilai Sakip Kecamatan 2) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128,356,200
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73,448,700
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBA	52,133,350

				N UMUM	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,488,000
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41,608,600

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Pace sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pace dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Pace dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Kecamatan Pace yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Seluruh unit kerja pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pace Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b) melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pace, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pace; dan

c) menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Pace dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI